

ANALISIS URGENSI SERTIFIKASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM Mendukung PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA TANGERANG

Muhammad Abid Djazuli ¹, Sri Prasetya Widodo ²
muhamadabid16@gmail.com¹, wwd3972@gmail.com²
Universitas Mpu Tantular

ABSTRAK

Kota Tangerang sebagai kota satelit dan pusat industri menghadapi tantangan besar dalam kualitas pembangunan infrastruktur. Masalah kegagalan struktur dan rendahnya standar keselamatan kerja seringkali berakar pada kurangnya kompetensi tenaga kerja yang terstandarisasi. Penelitian/jurnal ini bertujuan untuk merumuskan urgensi sertifikasi pelatihan konstruksi dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang besar dari proyek strategis nasional di Tangerang, kelemahan pada legalitas tenaga kerja lokal menjadi ancaman serius. Rekomendasi jurnal ini mendorong sinergi antara pemerintah kota dan sektor swasta untuk percepatan sertifikasi berbasis digital.

Kata Kunci: Sertifikasi Konstruksi, Kota Tangerang, Kompetensi Kerja, SWOT, Infrastruktur.

ABSTRACT

Tangerang City, as a satellite city and industrial hub, faces significant challenges in the quality of infrastructure development. Structural failures and low occupational safety standards are often rooted in a lack of standardized workforce competencies. This research/journal aims to formulate the urgency of construction training certification using a SWOT analysis. The analysis results indicate that despite significant opportunities from national strategic projects in Tangerang, weaknesses in the legality of local labor pose a serious threat. This journal's recommendation encourages synergy between the city government and the private sector to accelerate digital-based certification.

Keywords: Construction Certification, Tangerang City, Work Competence, SWOT, Infrastructure.

PENDAHULUAN

Sebagai kawasan satelit yang berperan sebagai pusat industri utama, Kota Tangerang mencatatkan progres ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang sangat progresif di wilayah Banten. Dinamika ini terlihat jelas pada masifnya pembangunan gedung-gedung vertikal, pengembangan area pabrik di distrik Jatiuwung, hingga optimalisasi sistem drainase kota untuk mitigasi bencana banjir. Seluruh proyek tersebut menuntut presisi teknis yang sangat ketat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi, di mana mayoritas personel konstruksi masih mengandalkan keterampilan yang didapat secara otodidak tanpa dukungan lisensi profesional yang diakui. Dari sisi regulasi, pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi para praktisi di bidang jasa konstruksi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban formal yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pengabaian terhadap standarisasi ini bukan hanya pelanggaran regulasi, melainkan juga ancaman nyata terhadap keselamatan kerja dan ketahanan struktur bangunan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk setinggi Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategis (Swot)

Untuk memetakan urgensi sertifikasi di Kota Tangerang, dilakukan identifikasi faktor

internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths): Kota Tangerang telah memiliki infrastruktur pendukung berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang representatif. Selain itu, terdapat keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan konsep pembangunan kota pintar (Smart City).
2. Kelemahan (Weaknesses): Rendahnya kesadaran kolektif tenaga kerja mengenai urgensi kepemilikan dokumen legalitas profesi masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, biaya mandiri untuk menempuh uji kompetensi nasional dirasa masih memberatkan bagi sebagian pekerja.
3. Peluang (Opportunities): Kehadiran berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti perluasan bandara, jalur tol, dan moda transportasi MRT di sekitar wilayah Tangerang membuka ruang penyerapan tenaga ahli dalam skala besar. Momentum ini juga dapat dimanfaatkan melalui skema kolaborasi CSR dengan pengembang properti besar di wilayah tersebut.
4. Ancaman (Threats): Dominasi tenaga kerja bersertifikat dari luar daerah berisiko meminimalkan peluang kerja bagi warga lokal. Selain itu, kontraktor menghadapi risiko sanksi hukum yang serius apabila tetap mempekerjakan personel tanpa lisensi resmi.

Analisis Dan Diskusi

Kebijakan sertifikasi bagi tenaga konstruksi di Kota Tangerang tidak boleh hanya dianggap sebagai pemenuhan aspek administratif atau beban biaya semata, melainkan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Penggunaan sumber daya manusia yang teruji secara kompetensi berperan krusial dalam menekan angka kegagalan teknis. Hal ini secara otomatis mereduksi biaya akibat pengerjaan ulang (rework), sehingga efisiensi anggaran pembangunan di Kota Tangerang dapat tercapai.

Dari sisi kesejahteraan sosial, sertifikasi ini memberikan payung hukum bagi pekerja serta berpotensi meningkatkan standar upah minimum mereka. Sebagai ilustrasi teknis, pembangunan infrastruktur seperti Waduk Aneka Elok membutuhkan akurasi tinggi pada elevasi dan kualitas turap. Apabila dikerjakan oleh tenaga yang tidak kompeten, fungsi infrastruktur dalam mengendalikan banjir tidak akan mencapai hasil yang optimal..

KESIMPULAN

Implementasi wajib sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di Kota Tangerang adalah langkah krusial untuk menjamin kualitas infrastruktur dan keselamatan publik. Sinergi antara regulasi yang ketat dan kemudahan akses pelatihan akan menjadikan Kota Tangerang sebagai barometer pembangunan konstruksi yang profesional di Indonesia.

Saran

1. Dinas Ketenagakerjaan setempat disarankan untuk menginisiasi skema bantuan biaya uji kompetensi (sertifikasi gratis) yang diprioritaskan bagi tenaga kerja berdomisili lokal guna meningkatkan daya saing warga asli.
2. Teknologi: Penggunaan platform digital (seperti aplikasi Tangerang LIVE) untuk memetakan sebaran tenaga ahli konstruksi yang sudah tersertifikasi.
3. Akademisi: Perguruan tinggi di Tangerang diharapkan membuka pusat ujian kompetensi (TUK) untuk mempermudah akses geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Banten Dalam Angka: Profil Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
- Dokumen Internal. (2024). Usulan Konsep Perencanaan Waduk Aneka Elok LMK.09 (Sebagai acuan struktur tata ruang).
- Kementerian PUPR. (2021). Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara RI.

Sugiyanto, dkk. (2022). Analisis Keselamatan Kerja dan Kompetensi Tukang pada Proyek Gedung Bertingkat. Jurnal Konstruksi Nasional.